Vol. 5. No. 1 (2022) 84-97	E-ISSN: 2723-4681	P-ISSN: 2722-2764
Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith		

Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga tentang Persamaan Hak Menerima Waris dalam Masalah Kalalah dan Radd

Muhammad Sopiyan; Siah Khosyi'ah

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: 3210110010@student.uinsgd.ac.id ; skhosyiah@gmail.com

Submitted:	Revised:	Published:
15-03-2022	28-04-2022	27-06-2022
DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i1.429		

Abstract

In the Qur'an, Islamic inheritance law is explained in detail, concretely and realistically, even according to mutaqqaddimiin scholars these verses are qoth'iyah (definitely) which closes the space for ijtihad. Meanwhile, the current reality is different from the situation when the inheritance verse was revealed and it is possible if inheritance law is translated within the scope of Islamic society according to the conditions and social situations that surround it. This study discusses equality of rights in inheritance with a focus on issues of loss and radd, because loss requires a more comprehensive understanding. The methodology uses a descriptive analysis approach to library data by collecting library data, reading and reviewing it and then doing an analysis to constructively criticize related to kalalah and rad. The results of the study were then analyzed that the development of the concept of kalalah and rad underwent many changes but what needs to be underlined is that everything depends on the illat according to the rules of ushul fiqh al-hukm yaduru ma'a 'iltrain.

Keywords: Development; Kalalah; Radd; Family Law; Heirs

Abstrak

Dalam al-Qur'an, hukum kewarisan Islam dijelaskan secara terinci, konkrit dan realistis, bahkan menurut para ulama mutaqqaddimiin ayat-ayat tersebut bersifat qoth'iyah (pasti) yang menutup ruang ijtihad. Sementara realitas saat ini berbeda dengan situasi pada saat ayat waris diturunkan dan tidak menutup kemungkinan jika hukum kewarisan diterjemahkan dalam ruang lingkup masyarakat Islam sesuai dengan kondisi dan situasi sosial yang melingkupinya. Penelitian ini membahas persamaan hak dalam waris dengan focus persoalan kalalah dan radd, karena kalalah memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif. Metodologi menggunakan pendekatan deskriptif analisis terhadap data pustaka dengan pengumpulan data pustaka, dibaca serta ditelaah kemudian dilakukan analisis untuk mengkritisi secara konstruktif berkaitan kalalah dan rad. Hasil penelitian kemudian dianalisis bahwa perkembangan konsep kalalah dan rad mengalami banyak hal perubahan namun yang perlu digaribawahi adalah segala sesuatu bergantung dari illatnya sesuai kaidah ushul fiqh al-hukm yaduru ma'a 'illatih

Kata Kunci: Kalalah; Radd; Hukum keluarga; Ahli Waris

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pemikiran atau gagasan dalam pembaharuan hukum kewarisan Islam sebagai wujud perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat melahirkan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan. Secara substantif pembaharuan tersebut lebih berada pada tataran aplikasi hukum (*tatbiq al-ahkam*), sebagai upaya mengangkat kenyataan hukum yang berada dalam kesadaran masyarakat, akomodasi ke dalam sistem hukum yang kemudian diformulasikan dalam legislasi hukum sebagai peraturan perundang-undangan sebagai hasil ijtihad individu atau hasil ijtihad atau kesepakatan para ulama' yang disebut ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Di antara gagasan pembaharuan itu, ialah:¹ pembagian warisan dengan cara damai, pembagian warisan ketika pewaris masih hidup, pembagian dengan sistem kolektif, dan pembagian warisan sistem gono-gini.

Pembagian warisan dengan cara damai diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 183 yang menyatakan, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan (*dalalah*) *qath'i*.

Salah satu aspek hukum yang diatur sedemikian terperinci dan sistematis dalam hukum Islam adalah soal pewarisan. Aspek ini menarik dan penting, bukan semata adanya pengaturan mengenai peralihan kekayaan antar generasi ke generasi, tetapi juga menyangkut kedudukan dan hak-hak perempuan dalam menerima kekayaan tersebut. Pembagian harta warisan menurut petunjuk al-Qur'an dan hadits bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela yakni mengambil dan memakan hak milik orang lain terutama hak milik orang yatim dengan jalan yang tidak benar.

Namun pada hal ini, Allah menerangkan bagian waris saudara- saudara baik sekandung, seayah maupun seibu yang biasa disebut dengan pembagian waris kalalah. Sedangkan sisanya dari pada harta disebut sebagai rad. Problem yang muncul dari keduanya adalah masalah adalah posisi Hukum islam dan penjelasan logis yang mampu di terima oleh masyarakat secara luas. Atas dasar itu, maka tujuan penelitian ini mencoba untuk membahas terkait persamaan hak dalam waris dengan fokus membahas persoalan *kalalah* dan *radd*, karena menurut penulis kalalah memerlukan penelitian lebih lanjut agar tidak sekedar dipahami dari makna *lughawi*. *Radd* dalam hukum waris islam terjadi ketika adanya sisa harta sesudah dibagikan kepada *dzawil furudh*, sedangkan ahli waris yang berhak atas sisa harta (*ashabah*) tidak ada, dan hal ini adalah pandangan ulama klasik yang memerlukan penafsiran kembali bahwa sisa harta waris mesti dibagi rata tanpa melihat jalur nasabiah dan diberikan rata

¹ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. IV, hlm. 198-206.

sesuai dengan hak pembagian dalam waris yang sudah ditetapkan, karena kondisi sekarang berbeda karena fungsi perempuan sudah ikut terlibat dalam hal mencari nafkah. Maka dalam hal ini perlu kajian baru dalam sisa harta waris (*radd*).

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis studi kepustakaan (*library research*) menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif yuridis. Yaitu suatu metode pengumpulan data pustaka, untuk dibaca serta ditelaah kemudian dilakukan analisis sehingga penulis kemudian dapat mengkritisi secara konstruktif berkaitan dengan hukum waris studi kalalah dan Rad. Sumber data penelitian adalah dengan menggabungkan sumber data primer dan sumber data sekunder terhadap topik-topik kajian yang memiliki hubungan dengan masalah kalalah dan rad. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan secara filosofis dan teoritis. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka tanpa disertai uji empirik. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk kata yang memerlukan pengolahan supaya ringkas dan sistematis.² Teknik pengolahan dan analisa data, penelitian yang melakukan analisa data terhadap literatur baik dalam sumber data primer maupun sekunder. Isi yang terkandung dalam literatur tersebut kemudian dikelompokkan dengan tahap identifikasi, klasifikasi, kategorisasi, dan kemudian interpretasi.³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Kewarisan dalam Islam

Kata mawaris merupakan bentuk *jamak* dari *mirast* (*irts*, *wirts*, *wiratsah* dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *muwarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warist*.⁴ Waris adalah bentuk isim fa'il dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, *fahuwa waritsun* yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata *waritsa* yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: *warits*, *muwarits*, *al-irts*, *warasah* dan *tirkah*.⁵

² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 159.

³ *Ibid*.

⁴ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), cet. II, hlm.1.

⁵ *Ibid*.

Muhammad Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa *mawarits* adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara.⁶ Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *fara'idh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.⁷

Hukum waris di Indonesia sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI dimana sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Beberapa pasal yang mengatur terkait hal tersebut seperti: Pasal 171 huruf e KHI yaitu terkait harta waris; Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) KHI terkait yang berhak dan yang terhalang menerima waris; Pasal 176 - Pasal 182 KHI terkait besara bagian masing-masing ahli waris; dan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KHI terkait wasiat dalam Islam.

KHI sendiri juga memuat peraturan Islam terkait perkawinan, perwakafan, pewarisan, dan lainnya dimana semuanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist. Kajian masalah-masalah waris didalam hukum Islam, merupakan salah satu materi pembahasan ilmu fiqih yang terpenting. Karena itulah para ahli fiqih telah mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan warisan, dan menulis karya-karya mengenai masalah-masalah waris ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya ilmu fiqih mawaris dalam istilah lain dinamakan juga ilmu faraidh

2. Sistem Kewarisan Islam

Sistem kewarisan Islam adalah untuk mengoreksi sistem kewarisan yang tidak adil yang sudah berlaku sejak pada masa- masa pra-Islam. Sebagaimana sistem hukum pada umumnya yang berkembang melalui tahapan-tahapan historis tertentu, maka demikian juga halnya dengan sistem kewarisan Islam. keputusan-keputusan mendetail tentang kewarisan Islam, baik berupa wahyu maupun sunnah Nabi Muhammad saw., berjalan secara regular dan berangsur-angsur selama 22 tahun dalam periode antara permulaan dakwah Nabi Muhammad pada tahun 610 sampai wafat beliau pada tahun 632 M. hukum kewarisan, ayat-ayat Al-Qur'an hanya menentukan ahli waris enam orang, yaitu suami, istri, anak (laki-laki dan perempuan), ayah, ibu dan saudara, sedangkan ahli waris lain tidak diatur didalamnya, seperti kekek, nenek, cucu dan lain sebagainya.

Dalam ayat Al-Qur'an yang sudah jelas adalah dalam surat An-Nisa,, (4) ayat 12 yaitu terjemahan dalam bahasa Indonesia ialah Dan bagimu para suami seperdua" dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Kata nisfu dalam ayat Al-Qur,,an yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia seperdua, kata ini sudah jelas, sehingga

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), cet. X, hlm. 33.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

tidak diperlukan penafsiran.

Hukum warisan sebagaimana mempunyai tiga fungsi hubungannya dengan Al-Qur'an, adalah pertama Sunnah sebagai penguat hukum dalam Al-Qur'an ini seperti Sunnah Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abas yang diriwayatkan Buchori dan Muslim yang maksudnya ialah Berikan faraa'id bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat. a.Hadits Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

"Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat" (HR. Bukhari).

Hadits Nabi dari Jabir r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

"Dari Jabir Ibnu Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah saw. Bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Yaa Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di Perang Uhud, paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta." Nabi berkata: "Allah swt akan menetapkan hukum dalam kajadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: "Berikanlah dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu." (HR. Abu Daud)

Hadits Nabi yang diriwayatkan dari „Imron bin Husein menurut riwayat Imam Abu Daud:

"Dari Imron bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. Sambil berkata: "Bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya." Nabi berkata: "Kamu mendapat seperenam." (HR. Abu Daud)

Menurut Muhammad Syahrur,⁸ Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku ketika perempuan sama sekali tidak terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga, ketika perempuan ikut mencari nafkah persentase bagian perempuan bertambah besar mendekati persentase bagian laki-laki sesuai dengan seberapa banyak ia terlibat dalam pencarian nafkah dan juga sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu dalam sejarah. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa' [4]: 11).

Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-

⁸ Muhammad Syahrur, *op. cit.*, hlm. 3.

masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu- bapaknya saja (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁹

Dengan demikian dalam hukum warisan bagian suami adalah seperdua (1/2) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istrinya. Kemudian contoh ayat Al-Qur'an yang artinya belum jelas, atau mempunyai arti ganda, akibatnya menimbulkan penafsiran dan terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam. Ayat al-Quran tersebut adalah dalam surat Al-Baqarah (1) ayat 228 yaitu yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Dan wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri tiga kali quru' . Kata *quru* dalam ayat Al-Qur'an mempunyai arti ganda, pertama dapat diartikan haid', dan kedua dapat diartikan suci". Sehingga kata quru,, kalau diartikan haid, waktu tunggu wanita apabila dicerai oleh suaminya tiga kali (3X) berarti 3 kali masa berjumlah 90 hari. Kemudian kata quru,, apabila ditafsirkan suci berarti tiga kali (3x) masa suci berjumlah 120 hari. Dalam hukum warisan ayat-ayat Al-Qur'an yang telah rinci hanya terbatas kepada ahli waris yang hubungan dengan pewaris sangat dekat, sebagaimana telah disebut di atas. Sedangkan untuk kerabat-kerabat yang lain belum diatur secara jelas. Ayat-ayat Al-Qur'an hanya menerangkan kerabat dekat, lebih berhak dari yang lainnya.

3. Asas-Asas Hukum Warisan Islam

Asas hukum warisan Islam dalam teks al-Quran dan As-Sunnah tidak dijumpai, dan asas tersebut merupakan hasil ijtihad para mujtahid.atau ahli hukum Islam. Dengan demikian kemungkinan asas hukum warisan Islam itu beragam. Menurut Amir Syarifuddin asas hukum warisan Islam lima macam, yaitu (1) asas ijbari, (2) asas bilateral, (3) asas individual, (4) asas keadilan berimbang, dan (5) asas warisan semata akibat kematian.¹⁰

a. Asas Ijbari

Kata *ijbari* secara etimologi mengandung arti paksaan, artinya melakukan sesuatu diluar kehendaknya sendiri. hukum warisan Islam berasaskan *ijbari*, maka pelaksanaan pembagian harta warisan itu mengandung arti paksaan tidak kehendak pewaris sebagaimana hukum warisan perdata barat.

b. Asas Individual

Maksud dari pada asas ini adalah harta warisan dari pewaris yang telah diterima oleh ahli warisnya, dapat dimiliki secara individu perorangan. Jadi bagian-bagian setiap ahli waris

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 78.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 123

tidak terikat dengan ahli waris lainnya, tidak seperti dalam hukum Adat ada bagian yang sifatnya tidak dapat dimiliki secara perorangan, tetapi dimiliki secara kelompok.

c. Asas Bilateral

Asas bilateral artinya ahli waris menerima harta warisan dari garis keturunan atau kerabat dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, demikian sebaliknya peralihan harta peninggalan dari pihak garis keturunan pewaris laki-laki maupun perempuan.

d. Asas Keadilan Berimbang

Dari pihak laki-laki dan pihak perempuan menerima harta warisan secara berimbang artinya dari garis keturunan pihak laki-laki dan dari garis keturunan pihak perempuan menerima harta warisan sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Antara laki-laki dengan perempuan keduanya mempunyai hak menerima harta warisan dari pewaris, namun tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan berbeda, laki-laki (*public family*) sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab nafkah keluarganya, sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga (*domestic family*), yang mengatur rumah tangga. Dengan demikian sangat wajar kalau al-Quran menetapkan laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan satu bagian.

e. Asas Warisan Semata Kematian

Hukum warisan Islam hanya mengenal satu bentuk warisan karena adanya kematian, seperti dalam hukum warisan perdata barat (BW), dengan istilah *ab intestato*, namun dalam hukum warisan BW, selain *ab intestato* juga karena adanya wasiat yang disebut *testament* termasuk sebagai bagian dari hukum warisan. Lain halnya dengan hukum Islam wasiat suatu lembaga hukum tersendiri, bukan sebagai bagian hukum warisan.

Menurut Amir Syarifuddin, asas ini ada hubungannya sangat erat dengan asas ijbari, disebabkan meskipun seorang ada kebebasan atas hartanya, tetapi setelah meninggal dunia kebebasan itu tidak ada lagi. Hal ini juga difahami bahwa harta dalam Islam mempunyai sifat amanah (titipan), artinya manusia berhak mengatur, tetapi harus sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah SWT, sehingga apabila seorang telah meninggal dunia tidak mempunyai hak lagi untuk mengaturnya, dan kembali kepada-Nya. Selain kelima asas tersebut asas *ta'awun* atau tolong-menolong juga merupakan asas hukum warisan Islam. hukum asas ini akan dijelaskan dalam *sub bab as-shulh*.

Ta'awun atau tolong-menolong diantara para ahli waris, sudah menjadikan kewajiban diantara ahli waris, bagi ahli waris yang mampu berkewajiban meringankan beban atau penderitaan ahli waris yang tidak mampu, dengan menyerahkan atau menggugurkan. Dasar hak harta warisannya, dan atau rela menerima harta warisan yang tidak sesuai dengan hak yang harus diterimanya. Dengan demikian salah satu ahli waris, dapat meringankan beban penderitaan, kesukaran ahli waris yang lain, apalagi para ahli waris itu dalam satu kekerabatan (hubungan darah).

4. Kalalah dan Rad

a. Konsep Kalalah

Sebagaimana yang dikutip oleh Siah Khosiah dalam bukunya bahwa kata *kalalah* terbentuk dari *marshdar* yang diartikan dengan *kalal* (kepayahan). Namun, *kalalah* yang dimaksud adalah orang meninggal dunia tidak meninggalkan leluhur baik laki-laki dan perempuan. Menurut sebagian pendapat, kata tersebut di ambil dari *iklil* (mahkota) yaitu benda yang membelit di kepala pada samping kanan dan kiri sehingga menutup kepala bagian atas. Ahli waris, selain orang tua dan anak, kumpul mengelilingi orang yang meninggal dunia dari samping, bukan dari *ashl* dan bukan dari keturunan, bagaikan membelitnya mahkota di kepala. Orang tua dan anak merupakan ujung dari seseorang sehingga jika mereka tidak ada, para ahli waris yang lain selain keduanya, disebut *kalalah*. Anak dan orang tidak digolongkan *kalalah*, sedangkan saudara dari golongan mana aja disebut *kalalah*, demikian pendapat jumbuh ulama.¹¹

Kalalah dibunyikan dalam al-Qur'an QS. An-Nisa' (4): ayat 12 dan 176. Dalam surah an-Nisa (4) ayat 12 dinyatakan bahwa :

jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersekutu dalam sepertiga itu....."

Sementara itu, dalam surah an-Nisa (4) ayat 176 dinyatakan bahwa :

" Allah beri fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu laki-laki mati (padahal) tidak ada baginya walad (anak) tetapi ada baginya seorang saudara perempuan, maka (saudara perempuan) ini dapat separoh dari apa yang ia tinggalkan, dan (saudara laki-laki) itu jadi warisnya (pula) jika tidak ada baginya walad (anak). Jika ada saudara perempuan itu dua orang, maka mereka berdua dapat dua pertiga dari apa yang ia tinggalkan, dan jika mereka itu laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki dapat bagian dua bagian perempuan. Allah terangkan bagi kamu supaya kamu tidak sesat, karena Allah amat mengetahui tiap-tiap sesuatu

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa jika seorang yang meninggal dunia tidak punya anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki maupun saudara perempuan dari yang meninggal dunia itu (pewaris), maka ia mendapat pembagian dari harta peninggalan pewaris itu. Mafhum mukhalafahnya menunjukkan bahwa jika seorang yang meninggal itu mempunyai anak (*walad*), maka saudara dari pewaris yang meninggal itu terdinding dalam arti tidak berhak mendapatkan pembagian dari harta warisan saudaranya yang meninggal itu. Pendapat para ulama klasik Adapun yang dimaksud *kalalah* menurut mereka adalah seseorang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan ayah. Para ulama'

¹¹ Siah Khosiah, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 175.

menafsirkannya bahwa kalalah itu seseorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, ataupun cucu dari anak laki-laki dan ayah.

Pembagian warisan pada kondisi *kalalah*, para ulama klasik (kewarisan *patriarkhi/patrilineal*) membedakan kedudukan saudara, yaitu pada ayat 12 surat an-Nisa menjelaskan bagian warisan untuk saudara seibu, sedangkan ayat 176 untuk saudara sekandung dan saudara seayah. Pendapat ini berpedoman pada khutbah Abu Bakar yang menerangkan demikian. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa *al-akh* pada ayat 12 ada tambahan *min'um*.

Rasyid Ridha pun menguatkan pendapat, bahwa *al-akh* dalam ayat 12 adalah saudara seibu. Namun ia membantah bahwa tambahan *min'um* atau *al-um* pada ayat itu seperti disebutkan dalam beberapa hadits sebagai betul-betul bagian dari al-Quran. Beliau mengatakan hal itu hanyalah penafsiran yang kemudian dianggap sebagai lafaz al-Quran yang dinasakhkan. Mengenai kalalah, beliau meriwayatkan pula tentang keragu-raguan Umar yang sangat, tetapi tetap menguatkan pendapat jumhur yang menganggapnya sebagai orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki (*walad*) dan ayah (*walid*).¹²

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Imam Malik dan atsar dari sahabat Abu Ishaq bahwa yang dimaksud kalalah adalah seseorang yang tidak meninggalkan dunia tidak meninggalkan anak, cucu dari anak laki-laki dan ayah, kakek. Bagaimana dengan anak, cucu perempuan dari anak laki-laki? Apakah bisa menghijab saudara-saudara dalam menerima warisan? Terkait dengan hal itu, terjadi perbedaan sengit di kalangan para ulama'. Ada yang berpendapat bahwa anak, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat menghijab saudara dalam menerima warisan, seperti Ibnu Rusyd. Tetapi kebanyakan ulama, bahwa anak, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak dapat menghijab saudara-saudara dalam menerima warisan. Pendapat ini berdasarkan hadits tentang meninggalnya Sa'ad Ibn Rabi'.

Jumhur sahabat mendasarkan pendapat mereka pada arti *isti'mal*, bahwa kalalah adalah orang yang mati tidak meninggalkan keturunan dan orang tua. Arti ini mereka kuatkan dan takhsis-kan dengan hadits-hadits, sehingga hanya mencakup orang yang tidak mempunyai anak (keturunan) laki-laki dan ayah. Keberadaan anak perempuan atau ibu tidak berpengaruh kepada kalalah.¹³

Yang dimaksud *kalalah* oleh Muhammad Syahrur adalah seseorang yang meninggal tidak memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dan ia tidak memiliki cucu yang ditinggal mati ayahnya, baik laki-laki maupun cucu perempuan, dan ia juga tidak memiliki ayah atau ibu, kakek maupun nenek. Jadi, dapat diartikan bahwa penerima warisan dalam kasus kalalah adalah suami/istri dan atau saudara-saudara si mayit laki-laki maupun

¹² Al-Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 96

¹³ Alyasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 59

perempuan baik saudara seibu, se ayah maupun sekandung. Pendapat Syahrur mengenai pengertian kalalah di atas, karena Syahrur ada penyifatan pada firman Allah surat an-Nisa ayat 176: *in imru'un halaka laysa lahu waladun*, (ketika seseorang meninggal dalam keadaan tidak mempunyai anak).

Menurut Syahrur, keberadaan kerabat yang dekat akan menghalangi kerabat yang lebih jauh untuk menerima pembagian harta waris, baik jika mereka terdiri dari satu orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan. Seperti ketika ada seseorang meninggal dunia, keberadaan anak perempuan (ke bawah) dan ibu (ke atas) masih ada, maka tetap akan menghalangi saudara-saudara untuk menerima harta warisan.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalalah adalah jika seseorang yang meninggal tidak mempunyai anak dan keturunannya serta tidak meninggalkan ayah. Pengertian tersebut memberikan gambaran yang lebih bersifat umum dalam menafsirkan *lapazd walad* (mungkin laki-laki atau mungkin perempuan serta keturunan dari anak laki-laki dan keturunan dari anak perempuan). Dari pengertian yang terdapat dalam KHI tersebut, saudara, baik sekandung, seapak, maupun se-ibu, dapat dihijab oleh anak laki-laki maupun perempuan. Jika menggunakan pasal 185 KHI, keturunan dari anak laki-laki maupun keturunan anak perempuan bisa menghijab saudara, sebagaimana orang tuanya (anak laki-laki maupun anak perempuan) menghijab saudara¹⁵

b. Konsep Radd

Radd adalah berkurangnya pembagi (jumlah bagian *fard*) dan bertambahnya bagian ahli waris, hal tersebut disebabkan oleh sedikitnya ashab *al-furud*, sedangkan jumlah seluruh bagiannya belum mencapai nilai sehingga ada harta warisan yang tersisa dan tidak ada seorangpun *ashabah* yang berhak menerimanya. Pada pasal 193 KHI menjelaskan bahwa apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dhaw al-faraidh* angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan ada ahli waris *ashobah*, pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *radd*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sementara sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

Rad akan terjadi jika terwujud tiga unsur, yaitu adanya *ashab al-furudh*, tidak adanya *ashabah*, dan adanya sisa harta wari, tiga unsur ini harus ada untuk terjadinya masalah *radd*, sebab jika tidak ada salah satunya maka tidak akan terjadi masalah *radd* itu, misalnya kalau ada ahli *warits* *ashabah* maka tidak akan terjadi Radd begitu pula kalau jumlah saham ahli warits sama besar dengan jumlah asal masalah *radd* dimaksud.¹⁶

Mengenai masalah *radd* ini tidak semua fuqaha sependapat menetapkannya pada garis besarnya ada dua pendapat dalam masalah ini, pendapat pertama adalah pendapat Zaid bin

¹⁴ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. *Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Qur'an Kontemporer II* oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, (Yogyakarta: Penerbit Elsaq Press, 2007), hlm. 41.

¹⁵ Siah Khosy'ah, *op. cit.*, hlm. 184.

¹⁶ Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag RI, 1982), Jilid III, hlm. 98.

Tsabit dan sebagian kecil sahabat mengingkari adanya *radd* dalam pembagian pusaka. Jika terjadi kelebihan harta dari saham para ahli waris, padahal tidak terdapat ahli waris *ashabah*, maka kelebihan itu tidak dikembalikan kepada ahli waris *ash habul furudh* melainkan sisa lebih diserahkan kepada *baitul mall*, untuk kepentingan kaum muslim.

Para Imam fuqaha seperti Urwah, Az Zuhri, Malik Asyafi'i dan Ibnu Hazm Azh Zhahiri pada dasarnya sependapat dengan Zaid bin Tsabit. Menurut fuqaha Malikiyah sisa lebih harta pusaka itu tidak boleh di Raddkan kepada *ash habul furudh* dikala tidak ada ahli waris *ashabah*, melainkan harus diserahkan kepada baitul maal. Demikian pula tidak boleh sisa lebih itu diserahkan kepada baitul maal baik baitul maal itu bekerja secara rapi ataupun tidak.

Fuqaha Syafi'iyah sependapat dengan fuqaha Malikiyah dalam masalah ini, yakni sisa lebih harta pusaka diserahkan kepada baitul maal, sebab kepala kas bendahara negara ataupun baitul maal, sebab kepala kas bendahara negara ataupun baitul maal menjadi pengawas dalam pelaksanaan kepentingan kaum muslimin.

5. Analisis Perkembangan Waris Studi Kalalah dan Radd

Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita (struktur masyarakat bilateral), maka wajar kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban juga seimbang, dalam hal ini termasuk hak dalam warisan. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan, apakah hukum waris Islam itu dapat berubah karena perubahan struktur sosial. Ternyata memang demikian, bahwa hukum waris Islam itu, sekurang-kurangnya dalam pelaksanaannya bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi sebab yang lebih kecil yaitu struktur Keluarga.

Secara umum keluarga dalam masyarakat modern Indonesia mcenderung menempatkan model keluarga inti, yaitu: bapak, ibu dan anak tanpa sanak saudara. Ini menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial. Dengan perkataan lain, keluarga inti merupakan model yang modern dalam masyarakat industri.

Persoalan kewarisan saudara yang termuat dalam ayat al-Quran adalah pembicaraan tentang kalalah. Makna kalalah mengandung banyak perdebatan di kalangan umat Islam, di antaranya ada yang kalalah adalah ahli waris, ada juga yang berpendapat kalalah itu pewaris itu sendiri (orang yang meninggal), dan pendapat yang meyakini kedua makna tersebut.¹⁷ Diluar itu ada juga yang berpendapat kalalah sebagai menantu perempuan. Namun, sejauh ini makan kalalah yang lebih sesuai dengan konteks ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentangnya adalah saudara laki-laki, baik ia berkedudukan sebagai pewaris maupun sebagai ahli waris.

Makna tersebut sesungguhnya telah Allah jelaskan dalam ayat 176 surat an-Nisa. Pertanyaan yang signifikan adalah kapan saudara memiliki hak untuk mewarisi. Dalam hubungan dengan hukum waris yang telah Allah jelaskan, saudara tidak dapat mewarisi ketika

¹⁷ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir at-Ṭabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil ay al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), IV, hlm. 191

pewaris memiliki anak (*walad*). Al-Quran tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini didasari bahwa kata *walad* mencakup pengertian maskulin (anak laki-laki) maupun feminim (anak perempuan), karena dalam bahasa Arab tidak dijumpai bentuk feminim pada kata *al-awlad*. Hazairin menghubungkan pengertian *walad* ini dengan dengan arti *mawali* dalam surat an-Nisa ayat 33, sehingga menghasilkan pemahaman yang luas tentang *walad*, yaitu keturunan. Dalam analisisnya tentang sistem kewarisan bilateral yang dicanangkan al-Quran, keturunan tidak dibedakan antara garis laki-laki dan perempuan.¹⁸ Dengan demikian, saudara hanya mewarisi ketika pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali.

Sedangkan penyelesaian *radd* yang dilakukan oleh jumhur ulama adalah memberikan *radd* kepada semua dhawil furud kecuali kepada suami/istri. Karena menurut mereka, maksud dari surah al-Anfal ayat 75, kekerabatan *nasab* lebih diutamakan dibandingkan dengan hubungan sebab seperti perkawinan. Namun baik KHI dengan keumumannya, maupun UU waris mesir No. 77 tahun 1943 mengikuti pendapat Utsman bin Affan yang menyatakan bahwa *radd* diberikan kepada semua ahli waris tanpa kecuali, termasuk suami/istri. Alasan yang digunakan adalah pada saat terjadi kekurangan harta, suami/istri ikut menanggungnya. Demi adanya keadilan hukum dalam masyarakat, maka ketika ada harta yang tersisa, suami/istri juga diikut sertakan sebagaimana keikutsertaan mereka dalam permasalahan awal. Apabila harta pewaris tidak habis dibagi (kelebihan) atau terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara *aul* dan *rad*. *Aul* untuk penyelesaian kekurangan dalam pembagian harta warisan pewaris, sedangkan *radd* merupakan metode untuk menyelesaikan kelebihan dalam pembagian harta pewaris.

Pengaturan mengenai *aul* dan *radd* ini terdapat dalam Pasal 192 dan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana pemecahan secara *aul* dengan membebankan kekurangan harta yang akan dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing dengan menaikkan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. Sedangkan *radd* yaitu dengan mengembalikan sisa kelebihan harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing secara berimbang di antara mereka. Agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaian pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui *radd* yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masing.¹⁹

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun, pada umumnya ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian sisa harta itu hanyalah ahli waris karena

¹⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 50

¹⁹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), ed. VI, hlm. 325.

hubungan darah, bukan ahli waris karena hubungan perkawinan.²⁰ Dalam KHI soal *radd* ini dirumuskan dalam Pasal 193 KHI yang berbunyi:

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.

Dalam rumusan tersebut tidak dibedakan antara ahli waris karena hubungan darah dengan ahli waris karena hubungan perkawinan. Penyelesaian pembagian warisan dapat dilakukan dengan damai berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam KHI hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 183 KHI yang berbunyi, *para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.*

Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut membuka peluang terhadap pengembalian kelebihan sisa harta warisan/*radd* dibagi rata bagi ahli waris termasuk pihak istri. Karena secara sosiologis istri juga ikut terlibat dalam proses mencari harta selama masa perkawinan, maka berhak mendapatkan sisa waris dari kasus *radd*.

D. KESIMPULAN

Kalalah pada prinsipnya merupakan warisan yang diberikan kepada penerima waris pada saat *muwarist* (pemberi warisan) tidak mempunyai keturunan sehingga harta tersebut dapat diberikan kepada kerabat dekat dan secara otomatis akan menghalangi kerabat yang lebih jauh untuk menerima pembagian harta waris. Sedangkan *radd* adalah salah satu harta sisa setelah dibagi habis kepada ahli waris, dengan jalur *nasabiah*. Pandangan para ulama klasik terkait sisa harta waris dalam kasus *radd* perlu dikaji kembali dan tidak sejalan kondisi sosial hari ini, sedangkan hukum bisa berubah dengan kondisi, zaman dan waktu. Pada era saat ini peran perempuan sudah berubah. Faktanya perempuan sudah ada juga yang dominan dalam mencari nafkah dalam kebutuhan rumah tangga dan peran lain. Jika kesimpulan ulama tentang sisa harta waris pada kasus *radd*, sang Istri tidak dapat lagi dari sisa *radd* tersebut, maka sungguh tidak adil dan tidak membawa kepada kemaslahatan, karena hukum itu diturunkan dalam kerangka untuk kemaslahatan di muka bumi ini sesuai kaidah hukum, *al-hukm yaduru ma'a 'illatih*.

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Al-Yasa'. 1998. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS.

²⁰ *Ibid.*

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *al-Mawarits fi asy-Syari'atil Islamiyah ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, Terj: A. M. Basalamah, Panduan Waris Menurut Islam. Jakarta: Gema Insani Press.
- Departemen Agama RI, 2002. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang, PT Karya Toha Putra.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 1982. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Depag RI.
- Hasbiyallah. 2013. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas.
- Ali, Mohammad Daud. 2004. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ibn Jarir at-Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad. t.th. *Jami' al-Bayan an Ta'wil ay al-Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Khosiah, Siah. 2021. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rake Sarasin.
- Rafiq, Ahmad. 2002. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrur, Muhammad. 2007. *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. *Prinsip dan Dasar Hermenutika Al-Quran Kontemporer*, oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta: Penerbit Elsaq Press.